HUKUM, DEMOKRASI
INDONESIA, DAN
PENILAIAN INDEKS
DEMOKRASI

Christina Clarissa Intania
Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

THE INDONESIAN Forum

Daftar pembahasan

- Relasi hukum dan demokrasi
- Index demokrasi yang diterbitkan lembaga internasional
- Temuan: praktik hukum Indonesia dan penilaian demokrasi
- Kesimpulan
- Rekomendasi

Relasi hukum dan demokrasi

- Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum memegang teguh konsep ***rule of law***, dimana hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

- *Rule of law* dan demokrasi pun **saling memengaruhi satu sama lain** juga atribut yang sama-sama **diinginkan dlam sistem politik** (Tommasoli, 2012; Ferejohn dan Pasquino, 2003).



Indeks demokrasi yang diterbitkan lembaga internasional

Freedom House

BTI TRANSFORMATION INDEX

The Economist INTELLIGENCE UNIT

V-Dem VARIETIES OF DEMOCRACY

Untuk apa **penilaian** demokrasi?



Indeks demokrasi yang diterbitkan lembaga internasional

Untuk apa penilaian demokrasi?

- **Studi banding**
- Bahan **pertimbangan pembuatan kebijakan luar negeri**
- Digunakan oleh jurnalis dalam **liputan** untuk mendeskripsikan negara lain
- Para pembuat kebijakan dan media **memperjuangkan** skor positif dan menggunakan skor negatif sebagai pembenaran untuk melakukan reformasi.
- Digunakan World Bank untuk menyusun Worldwide Governance Indicators yang nantinya digunakan donor untuk memeriksa **keefektifan program pembiayaan luar negeri**

Sarah Sunn Bush (2017); Michael Coppedge and John Gerring (2011).

Penilaian Indonesia oleh Freedom House





Hak Politik

- proses elektoral
- keberagaman dan partisipasi politik
- fungsi pemerintahan

Kebebasan Sipil

- kebebasan berekspresi dan berkepercayaan
- hak berkumpul dan berserikat
- *rule of law*
- hak individu

Penilaian Indonesia oleh Freedom House

Hak Politik

- proses elektoral
- **keberagaman dan partisipasi politik**
- fungsi pemerintahan

Penurunan nilai untuk aspek pemilu yang bebas dari pengaruh eksternal atau oleh kekuatan politik

Pelanggaran etik berat Mantan Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam memutus pengujian syarat calon wakil presiden

Catatan lain:

- **Pemilu langsung** menjadi nilai plus
- Perlunya **konsultasi** KPU dan Bawaslu pada DPR untuk membuat peraturan terkait pilkada bisa mempengaruhi independensi KPU dan Bawaslu
- Kuota **keterwakilan perempuan 30%** di parlemen
- **Korupsi** di tingkat nasional maupun daerah
- **Transparansi** pemerintah yang masih terbatas





Penilaian Indonesia oleh Freedom House

Akses bit.ly/EvaluasiPBM2006

Kebebasan Sipil

- kebebasan berekspresi dan berkepercayaan
- hak berkumpul dan berserikat
- *rule of law*
- hak individu

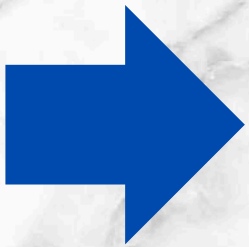
Catatan:

- **UU ITE** yang mengkriminalisasi jurnalis
- Persyaratan **pembangunan rumah ibadat** dan pengaturan **penistaan agama**
- **Pembubaran diskusi** dengan tema LGBTQ+, antar agama dan kepercayaan, Papua, kekerasan polisi, dan pembantaian komunis tahun 1965-1966
- Pembahasan topik sensitif di dunia maya maupun demonstrasi di lapangan mendapat **perlawanan dan intimidasi**
- **UU Cipta Kerja** yang pembentukannya tidak transparan dan partisipatif
- **Pengadilan** masih ada yang **korup** dan bisa terpengaruh agama. Pelanggaran kode etik berat Mantan Ketua Hakim Konstitusi.
- **Proses hukum yang berkeadilan** masih jadi tantangan
- **Lembaga permasyarakatan** yang penuh dan korup
- **Pungli** pengurusan administrasi
- Problema **domisili masyarakat adat**
- Terbitnya **UU TPKS** menjadi perkembangan
- **Inkonsistensi** penerapan standar lingkungan kerja dan kompensasi

Temuan

Penyelenggaraan hukum di Indonesia yang dipandang oleh lembaga internasional:

- produk hukum yang **substansinya problematik** dan **membatasi** kebebasan individu seperti kebebasan berekspresi, beribadat, dan bertempat tinggal;
- pembentukan produk hukum yang **tidak transparan dan minim partisipasi publik**;
- kurangnya **proses penegakan hukum yang adil** di seluruh wilayah Indonesia; dan



Mempengaruhi penilaian indeks Indonesia

Kesimpulan

Demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada kualitas dinamika hukumnya

Rekomendasi

1. Perlunya juga **pendekatan** HAM, sosiologis, inklusi, dan toleransi dalam penyusunan substansi peraturan perundang-undangan
2. Perlunya peningkatan **transparansi dan partisipasi** dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
3. Perlunya **pengawasan** lebih ketat dari Komisi Yudisial dan lembaga-lembaga pengawas dan etik masing-masing profesi penegak hukum untuk menindaklanjuti adanya pelanggaran etik atau maladministrasi dalam proses penegakan hukum;
4. Masyarakat ikut **mengawasi** jalannya demokrasi, memahami apa haknya sebagaimana dilindungi dalam konstitusi, dan melindungi akses ke demokrasi orang lain.

HUKUM, DEMOKRASI
INDONESIA, DAN
PENILAIAN INDEKS
DEMOKRASI

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

THE INDONESIAN Forum

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com